

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI BLORA SIAP CAIR



Sumber Gambar:

<https://hrdpintar.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/THR.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Blora – Tunjangan Hari Raya atau THR PNS dan PPPK di Kabupaten Blora segera dicairkan. Rinciannya 6.021 PNS dan 2.927 PPPK akan mendapatkan THR tersebut. Pemkab Blora telah menganggarkan sebesar Rp 46,33 miliar untuk pembayaran THR itu. Pembayaran THR tersebut sesuai dengan PP Nomor 14 tahun 2024 tentang THR dan Gaji ke-13 ASN, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan 2024.

Kepala BPPKAD Blora Slamet Pamudji menjelaskan, THR PNS dan PPPK kini tengah proses pencairan. Komponen THR tersebut yakni gaji satu bulan dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

”Iya sudah kita anggar, pencarian TPP dan THR ASN ini akan segera dilakukan menjelang hari raya,”ungkap Slamet Pamudji, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/03/2024).

Ia menjelaskan, THR tahun ini telah dianggarkan dalam APBD 2024. Tahun 2024, anggaran THR tersebut akan dialokasikan untuk 6.021 PNS dan 2.927 PPPK.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan berdasarkan keputusan presiden (Perpres) penyaluran THR bagi pegawai negeri sipil akan disalurkan 10 hari sebelum lebaran. Untuk THR pegawai, akan dibayarkan per satu bulan gaji dan ditambah satu bulan TPP.

”10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sudah disalurkan. THR untuk ASN sudah disiapkan, batas waktu pembayaran minimal H-10 menjelang lebaran, surat edaran sudah kita siapkan dan bisa dilaksanakan,” pungkas Mumuk. (Nathan)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/nathan/411501/thr-pns-dan-pppk-di-blora-siap-cair>, “THR PNS dan PPPK di Blora Siap Cair.”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://tuturpedia.com/pemkab-blora-anggarkan-rp4633-miliar-untuk-thr-asn-kapan-cairnya/>, “Pemkab Blora Anggarkan Rp46,33 Miliar untuk THR ASN, Kapan Cairnya?”, tanggal 26 Maret 2024.
3. <https://blora-ekspres.com/segera-dicairkan-pemkab-blora-anggarkan-rp-4633-miliar-untuk-thr-asn/>, “Segera Dicairkan, Pemkab Blora Anggarkan Rp 46,33 Miliar untuk THR ASN”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;

- b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
- a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi